



PENGARUH PEMADANAN NIK MENJADI NPWP TERHADAP PENGKINIAN DATA PELANGGAN DI PT. BORWITA CITRA PRIMA

Estevania Angel Gloria

21013010010@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Indrawati Yuhertiana

yuhertiana@upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: 21013010010@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. This study examines the impact of integrating the National Identification Number (NIK) as the Taxpayer Identification Number (NPWP) on customer data at PT. Borwita Citra Prima. Tax is a mandatory contribution from the public to the state, vital for economic development and public welfare. However, there is a significant gap between the number of taxpayers and working individuals in East Java, attributed to complex tax regulations. The Indonesian government aims to improve tax compliance by implementing the Single Identity Number (SIN), where NIK serves as NPWP. This research uses a qualitative case study approach, involving interviews and observations with 5 informants from PT. Borwita Citra Prima's administration and sales departments. The findings reveal that using NIK as NPWP enhances tax compliance, administrative efficiency, and data accuracy, thereby supporting better business strategies and market analysis.

Keywords: Customer Data; Single Identity Number; Tax Compliance

Abstrak. Penelitian ini mengkaji dampak integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap data pelanggan di PT. Borwita Citra Prima. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang penting untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan publik. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara jumlah wajib pajak dan individu yang bekerja di Jawa Timur, disebabkan oleh regulasi pajak yang kompleks. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dengan menerapkan Single Identity Number (SIN), di mana NIK berfungsi sebagai NPWP. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, melibatkan wawancara dan observasi dengan 5 informan dari departemen administrasi dan penjualan PT. Borwita Citra Prima. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP meningkatkan kepatuhan pajak, efisiensi administrasi, dan akurasi data, sehingga mendukung strategi bisnis dan analisis pasar yang lebih baik.

Kata Kunci: Data Pelanggan; Kepatuhan Pajak; Nomor Identitas Tunggal

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa menerima imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Mardiasmo, 2018). Selain itu, Dr. Soeparman Soemahamidjaja menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban bagi individu atau komunitas untuk memberikan kontribusi, baik berupa uang maupun barang, kepada penguasa sesuai dengan berbagai standar hukum yang berlaku. Tujuan dari pajak ini adalah untuk membiayai produksi barang dan jasa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sihombing, 2020). Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan terhadap negara yang diwajibkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Melihat pentingnya peran perpajakan saat ini untuk perekonomian negara, berbanding terbalik dengan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perpajakan. Menurut BPS (2022), jumlah orang yang sedang bekerja di wilayah Jawa Timur mencapai 22 juta jiwa, sedangkan DJP Jawa Timur pada tahun 2023 merilis bahwa sebanyak 344.095 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan PPh (Pajak Penghasilan). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan cukup besar antara jumlah wajib pajak dan jumlah orang yang sedang bekerja. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat terlalu abai terhadap kewajiban perpajakan, salah satunya adalah karena menganggap aturan pajak yang kompleks (Putri & Adi, 2022).

Dalam era yang semakin canggih ini, perpajakan Indonesia mengambil perubahan besar. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan memperkenalkan sistem perpajakan yang baru melalui implementasi Single Identity Number (SIN), yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah ini diharapkan dapat memenuhi prinsip kesederhanaan dan manfaat yang lebih baik (Tobing & Kusmono, 2022).

Pada tanggal 14 Juli 2022, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-112/PMK.03/2022 mengenai penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi orang pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah. wajib pajak dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP, dengan syarat NIK tersebut masih berlaku. Pemadanan NIK sebagai NPWP dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak melalui jalur yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk melalui situs atau website resmi (Theodora, 2023).

Perubahan ini bertujuan untuk memudahkan administrasi perpajakan dan membentuk basis data pajak yang lebih besar dan lebih akurat. Dalam artikel ini, akan membahas mengenai dampak dari adanya perubahan NIK menjadi NPWP sebagai *single identity* terhadap data pelanggan pada sebuah perusahaan distribusi, yaitu pada PT. Borwita Citra Prima.

Perubahan NIK menjadi NPWP memiliki implikasi yang signifikan terhadap perusahaan distribusi. Dengan menggunakan NIK sebagai NPWP, perusahaan dapat memiliki akses lebih mudah dan lebih akurat terhadap data pelanggan. Selain itu, perubahan ini juga dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan membantu perusahaan dalam meningkatkan strategi bisnis.

Dalam penelitian ini, akan mengkaji dampak dari penggunaan NIK sebagai NPWP terhadap upaya perusahaan distribusi dalam melakukan pengkinian data pelanggan, serta meninjau bagaimana perubahan ini mempengaruhi proses pengelolaan data pelanggan. Kami juga akan meneliti bagaimana perubahan ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan strategi bisnis mereka dengan menerapkan strategi penanganan untuk menghadapi tantangan dalam pengkinian data pelanggan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dari adanya perubahan NIK menjadi NPWP sebagai single identity terhadap pengkinian data pelanggan pada PT. Borwita Citra Prima, serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana

perusahaan distribusi dapat mengatasi perubahan dalam sistem administrasi perpajakan, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengkinian data pelanggan. Diharapkan bahwa penelitian membantu perusahaan dalam mengadopsi pemandangan NIK menjadi NPWP sehingga dapat memperlancar administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak pelanggan mereka. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak dari wajib pajak serta mempermudah sistem administrasi perpajakan secara keseluruhan.

KAJIAN TEORI

Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nomor induk kependudukan atau yang biasa disebut NIK adalah kode identitas unik yang tersemat pada individu secara khusus. Nomor tersebut bersifat permanen dan tidak dapat diubah karena nomor ini digunakan didesain untuk setiap individu yang berkebangsaan Indonesia (Finaka, 2023). Menurut (Tobing & Kusmono, 2022) NIK ini terdiri dari 16 digit angka yang memiliki arti masing-masing.

NIK terdiri atas berbagai macam kode identifikasi, 2 kode pertama diklasifikasikan sebagai kode provinsi tempat tinggal, selanjutnya 2 digit yang mengindikasikan kota/kabupaten individu yang bersangkutan, 2 kode digit yang menunjukkan kecamatan, dan enam digit terakhir yang menunjukkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran. Ada pula formula khusus bagi perempuan, di mana tanggal lahirnya ditambah dengan angka 40. Keempat digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang dihasilkan secara otomatis, dimulai dari angka 0001 (Hartantri, 2022).

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada setiap wajib pajak untuk tujuan administrasi perpajakan di Indonesia. NPWP berfungsi sebagai sarana identifikasi dan pelaporan untuk proses pembayaran serta pengumpulan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. (Mardiasmo, 2011) juga menyebutkan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada warga negara indonesia sebagai sarana pencatatan administrasi perpajakan, NPWP juga mempunyai fungsi lain untuk mengenali individu atau perusahaan agar pembayaran pajak yang dilakukan dapat terlaksana.

Kode NPWP terdiri dari 15 digit, 9 digit pertama merupakan keterangan kode perpajakan dan 6 digit terakhir merupakan keterangan kode administrasi. Kode NPWP terdiri dari 15 digit, 9 digit pertama merupakan keterangan kode perpajakan dan 6 digit terakhir merupakan keterangan kode administrasi (Hipajak, 2023).

Pengertian Single Identity Number (SIN)

Sistem nomor identitas tunggal atau kerap disebut *Single Identity Number*, yang kemudian disingkat SIN adalah identitas pribadi berisi berbagai informasi, seperti data diri, data finansial, informasi kepemilikan aset, dan lainnya (Andry, 2020). Sistem identitas tunggal ini sudah ada sejak lama terbukti dari kerangka yang dibuat dalam Undang-Undang Jaminan Sosial Amerika Serikat oleh Presiden Roosevelt di tahun 1935 (Meiser, 2018). *Single Identity Number* adalah sistem yang mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memudahkan administrasi perpajakan dan membangun basis data yang kuat bagi pemerintah (Tobing & Kusmono, 2022).

Pengkinian Data Pelanggan

Suryadi dan Ramadhan (2018) mendefinisikan pengkinian data pelanggan sebagai proses pengelolaan data yang melibatkan verifikasi, validasi, dan penyuntingan data pelanggan secara berkala untuk memastikan bahwa data pelanggan tetap akurat dan valid. Proses pengkinian data pelanggan, yang dilakukan di perusahaan distribusi, dapat meningkatkan keberhasilan kualitas data dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih optimal.

Manfaat Single Identity Number terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan penelitian (Novis, 2023) menunjukkan bahwa sistem nomor identitas tunggal ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak oleh meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Hal ini juga didukung oleh penelitian (Septiyani & Sitompul, 2022) SIN berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi.

Manfaat Single Identity Number terhadap Pengkinian Data Pelanggan

Pemadanan NIK menjadi NPWP dapat memudahkan pengelolaan data pelanggan dan juga membantu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Berdasarkan penelitian (Novia, 2023) SIN mempengaruhi efektivitas pembaruan data pelanggan. Dengan adanya SIN, data pelanggan dapat diperbarui secara lebih efektif dan akurat, sehingga memastikan keakuratan informasi yang tersimpan dalam sistem perusahaan

Manfaat Single Identity Number terhadap Efisiensi Operasional Perusahaan

Berdasarkan penelitian (Ratmayanti, 2021) untuk meningkatkan tingkat efisiensi operasional suatu perusahaan perlu melakukan upaya perbaikan sistem kerja, dan perbaikan sarana dan prasarana, Penggunaan SIN dapat menghemat biaya dan juga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan langkah pengkinian data pelanggan dapat menjadi upaya perusahaan untuk mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan kecepatan dalam pengelolaan data pelanggan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbasis studi kasus. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek dalam keadaan alami. Penelitian ini dilakukan pada sebuah perusahaan distribusi yaitu PT. Borwita Citra Prima yang telah melakukan pengkinian data pelanggan. Penelitian dilakukan selama 5 bulan dari Januari 2024 hingga Juni 2024.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 5 informan dan observasi langsung di lokasi kerja perusahaan. Nama para informan dijelaskan sebagai berikut:

Nama Informan	Jenis Kelamin	Jabatan	Divisi/Bagian
DS	Laki-laki	Compliance Manager	Sales
DV	Perempuan	Supervisor	Tax
AS	Perempuan	Admin	Tax
AP	Perempuan	Admin	Sales
WD	Laki-laki	Admin	Tax

Tabel 1. Data Informan

Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan adalah sebagai berikut:

1.Apakah pengkinian data pelanggan yang dilakukan termasuk upaya PT. Borwita Citra Prima untuk mengikuti aturan pajak yaitu pemandangan NIK menjadi NPWP?, 2.Apakah adanya pengkinian data dapat memudahkan tim *tax* untuk urusan administrasi perpajakan?, 3.Bagaimana pengaruh *single identity* terhadap strategi perusahaan?

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan triangulasi teknik (wawancara dan observasi) dan triangulasi sumber. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema yang terkait dengan dampak pemandangan NIK menjadi NPWP sebagai *single identity* terhadap pengkinian data pelanggan dari hasil wawancara dan observasi, serta mengaitkan tema tersebut dengan teori dan konsep yang sesuai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu DV sebagai bagian dari tim perpajakan, selama ini perusahaan selalu melaporkan perpajakannya dengan tertib dan teratur. Pada tahun 2017, PT. Borwita Citra Prima meraih penghargaan “*Third Best Tax Payer for KPP Madya Sidoarjo*” Menurut penuturan dari bagian penjualan, sejauh ini PT. Borwita Citra Prima selalu mentaati peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan DS,

“Iya mbak, selama saya bekerja disini, Borwita selalu mengikuti peraturan perpajakan yang ada. Seperti sekarang ini ada peraturan Single Identity, makanya dibuat project validasi data pelanggan yang difokuskan untuk update NIK pelanggan”

Peraturan terbaru terkait dengan pemandangan NIK sebagai NPWP ditanggapi secara positif oleh PT. Borwita Citra Prima dengan mengadakan pengkinian data pelanggan. Pengkinian data pelanggan ini bertujuan untuk memperbarui *database* pelanggan sehingga perusahaan dapat dengan mudah mengetahui pelanggan mana saja yang termasuk dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non PKP. Dapat diketahui bahwa pengusaha yang memiliki pendapatan dari hasil kegiatan usahanya wajib melaporkan dan membayar pajak penghasilan. Sehingga dengan adanya pengkinian data pelanggan, perusahaan dapat melacak mana saja pelanggannya yang sudah mentaati perpajakan atau tidak. Penelitian sebelumnya oleh (Septiyani & Sitompul, 2022) juga menemukan bahwa *Single Identity Number* membantu orang pribadi memenuhi kewajiban pajak mereka.

Efisiensi Administrasi Perpajakan

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan informan AS sebagai bagian administrasi perpajakan di PT. Borwita Citra Prima, dapat diketahui bahwa pengkinian data pelanggan yang dilakukan memberikan kemudahan dalam proses verifikasi data pelanggan karena kesesuaian langsung antara data NIK dan NPWP yang diintegrasikan ke dalam sistem perusahaan,

“Validasi pengkinian data itu penting, terlebih untuk pelanggan prioritas ber-NPWP. Fungsi validasi pelanggan prioritas ber-NPWP (baik pribadi maupun badan) itu gunanya buat update ke NPWP 16 digit. Soalnya NPWP badan itu ada yang punya cabang, kalo NPWP cabang itu pake NITKU”

Bapak DS selaku *Sales Compliance Manager* juga mengungkapkan bahwa pengkinian data pelanggan dapat memudahkan tim perpajakan untuk mengurus pengenaan PPN, “*Iya salah*

satunya untuk memudahkan tim tax dalam mengurus pajak untuk pelanggan dan tidak ada kesalahan dalam pengenaan PPN ke pelanggan (lebih tepat dan tertib dalam urusan perpajakan dengan pelanggan)"

Hal ini sesuai dengan penelitian (Tobing & Kusmono, 2022) yang menyatakan bahwa *Single Identity Number* membantu membentuk basis data yang lebih akurat dan memudahkan administrasi pajak. Menurut mereka, pemanfaatan NIK sebagai NPWP ini sangat membantu bagian administrasi perpajakan dalam pembuatan faktur pajak serta pelaporannya.

Keakuratan Data Pelanggan

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, menunjukkan bahwa pengkinian data pelanggan menjadi lebih terstruktur dan akurat. Pada awalnya upaya pengkinian data ini dilakukan sebagai tindakan perusahaan untuk berkontribusi mematuhi peraturan perpajakan dengan pemanfaatan NIK sebagai NPWP, namun hasil dari pengkinian data pelanggan tersebut semakin berdampak positif untuk keakuratan data pelanggan di PT. Borwita Citra Prima.

Bagian admin penjualan mengungkapkan bahwa pengkinian data pelanggan yang dilakukan berguna untuk merekam pelanggan yang masih aktif. Utamanya dengan NIK menjadi NPWP, menghasilkan data pelanggan yang akurat.

"Pada dasarnya pengkinian data dibutuhkan untuk data base perusahaan yang bahan utamanya adalah data pelanggan itu sendiri, pengkinian data juga merupakan strategi efisien yang dilakukan perusahaan untuk merekam toko-toko mana saja yang masih beroperasional dan tidak"

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Novia, 2023) yang menunjukkan bahwa *Single Identity Number* mempengaruhi seberapa efektif pembaruan data pelanggan.

Pengaruh Single Identity Number terhadap Strategi Bisnis Perusahaan

Penggunaan *Single Identity Number* berupa pemanfaatan NIK sebagai NPWP membantu PT. Borwita Citra Prima membuat strategi bisnis yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang penjualan serta observasi yang dilakukan, adanya pengkinian data pelanggan yang dilakukan perusahaan dapat digunakan untuk analisis pasar yang lebih menyeluruh dengan data pelanggan yang lebih akurat dan terintegrasi.

"Pengaruhnya cukup besar terutama untuk memudahkan identifikasi pelanggan sehingga bisa lebih efektif dan efisien dalam administrasi pelanggan"

Data pelanggan yang sudah diperbarui dapat membantu strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Analisis pasar yang lebih baik memungkinkan perusahaan untuk menargetkan pelanggan dengan lebih tepat dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Ini sejalan dengan penemuan yang dilakukan oleh (Ratmayanti, 2021) bahwa *Single Identity Number* dapat meningkatkan efisiensi operasi bisnis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan NIK menjadi NPWP sebagai *Single Identity Number* memiliki dampak positif terhadap kegiatan usaha di PT. Borwita Citra Prima. Dalam hal kepatuhan pajak, perusahaan telah mematuhi peraturan perpajakan Indonesia saat ini dan memperbarui *database* pelanggan. Pemanfaatan NIK menjadi NPWP memudahkan perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan mana yang termasuk dalam kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau non-PKP. Dalam hal efisiensi administrasi perpajakan, pemanfaatan ini telah membantu bagian administrasi perpajakan dalam pembuatan faktur pajak dan pelaporannya.

Karena kesesuaian langsung antara data NIK dan NPWP yang diintegrasikan ke dalam sistem perusahaan, proses verifikasi data pelanggan menjadi lebih cepat dan lebih akurat.

Pengkinian data pelanggan telah menjadi lebih terorganisir dan akurat dalam hal keakuratan data pelanggan. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP dapat mengurangi kesalahan data sebelumnya. Penemuan ini mendukung penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah identitas tunggal mempengaruhi seberapa efektif pembaruan data pelanggan.

Penggunaan NIK sebagai NPWP telah membantu perusahaan membuat strategi bisnis yang lebih baik dalam hal pengaruh nomor identitas tunggal terhadap strategi bisnis mereka. Data pelanggan yang diperbarui dapat membantu analisis pasar yang lebih menyeluruh dengan data pelanggan yang lebih akurat dan terintegrasi. Selain itu, data pelanggan yang diperbarui dapat membantu strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk PT. Borwita Citra Prima yaitu mengoptimalkan pengkinian data pelanggan yang dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data pelanggan, selain itu perlu adanya sosialisasi antar *sales* terhadap pelanggan mengenai pemadanan NIK sebagai NPWP sehingga para pelanggan juga dapat memberikan tanggapan yang positif terhadap upaya pengkinian data yang dilakukan.

Saran untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak pemadanan NIK sebagai NPWP pada sektor industri lainnya. Metode penelitian yang digunakan juga dapat dikembangkan sehingga menghasilkan gambaran yang lebih luas terkait dampak kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, N. A., & Furqon, N. I. K. (2023). Integrasi NIK Menjadi NPWP dengan Sistem Single Identity Number (SIN) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 64–71. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2725>
- BPS Provinsi Jawa Timur. (n.d.). Retrieved from jatim.bps.go.id website: <https://jatim.bps.go.id>
- Budi, W., Trisna, P., Pratiwi, W., & Dwi, R. (2023). Sosialisasi Dan Asistensi Validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi. *Jurnal Sewaka Bhakti*.
- Mardiasmo (2019). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI
- Novia, N. A., Amelia, R., Putra, E., & Dhelnati, F. (2023). Eksistensi Single Identity Number Melalui NIK Menjadi NPWP Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Efektifkah? *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 483–495. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i2.19987>
- Septiyani, C., & Sitompul, G. O. (2022). Pengaruh Single identity Number terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(4), 387–392. <https://doi.org/10.5918/jurnalsostech.v2i4.330>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Widina.
- Soemartono, T., Minarni, S., Dewi, K., & Setiotirin, R. (2023). Challenges of Coordination and Public Understanding in Implementing NIK and NPWP Integration Policies. *ICCD*.
- Sunani, A (2018). Pengaruh Iklim Etika Dan Pengalaman Kerja Terhadap Persepsi Etis Akuntan Publik Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, ejurnal.unitomo.ac.id,
- Tobing, E. G. L., & Kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 183–193. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>
- Yuhertiana, I., Priono, H., Moestika Setyaningrum, R., & Hastuti, S. (2017). Ethics and performance: Understanding the psychological contract of the taxation from the view of the employee tax. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 18(3), 331–342.
- Yuhertiana, I, Hastuti, S, & Sundari, S (2015). Non Compliance Tax Attitude Is Considered Unacceptable In Small Business. *Akuntabilitas*, journal.uinjkt.ac.id.